

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, R., & Riza, F. (2018). Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama. *Jurnal EduTech*, 4(2), 34.
- Afandi, M. I., & Warjio. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Deskriptif di Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat). *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 92–113. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/70>
- Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik* (edisi revisi). Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Akib, H. (2009). Artikulasi Perkembangan Ilmu Administrasi Publik. *Jurnal Baca*, 3(1), 1–17. <https://www.scribd.com/doc/119148085/Artikulasi-Perkembangan-Administrasi-Publik-Jurnal-BACA-2009>
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan : Apa, mengapa Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–100. <https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf>
- Alghifary, W., & Suryaningsi. (2021). Optimalisasi Layanan Hukum untuk Masyarakat Miskin. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(4), 135–141.
- Alizah, B., & Mawar, M. (2023). Implementasi Kebijakan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang. *Petanda: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora*, 6(1), 78–87. <https://doi.org/10.32509/petanda.v6i1.3801>
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Pustaka Setia
- Asshiddiqie, J. (2006). *Gagasan Negara Hukum Indonesia. Gagasan negara hukum Indonesia*. In Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, 1–17.
- Chambers, R. (1987). *Pembangunan Desa, Mulai Dari Belakang*. Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan penerangan Ekonomi dan Sosial
- Darmawan, M. R., & Eddy, T. (2022). Analisis Yuridis Peran Pengadilan Dalam Upaya Memberikan Layanan Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. *Jurnal Doktrin Review*, 01(01), 140–151.

- Dwijayanti, P. (2013). Komunikasi Dan Koordinasi Yang Sinergi Antara Pemerintah Desa Dan Bpd Dalam Pembuatan Peraturan Desa. *Jurnal Governance, Prodi Ilmu Pemerintahan*, 1(1).
- Fauzan. (2018). Penerapan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Posbakum Di Pengadilan Agama Kota Bengkulu. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 4(2), 125–134. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v4i2.1016>
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Jonata, Mouw, E., Hasanah, N., Mashudi, I., Maharani, A., Nuryami, K. A. R. N., & Waris, L. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In Y. Novita (Ed.), Rake Sarasin (Nomor Maret). PT. Global Eksekutif Teknologi. <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- Fischer, F., Miller, G. J., & Sidney, M. S. (eds.). (2007). *Handbook of Public Policy Analysis. Theory, Politics, and Methods*. Boca Raton, FL: CRC Press
- Harahap, Y. (2005). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hardianto. (2020). Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Layanan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Palopo. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 5(2), 31–39. <https://doi.org/10.24256/alw.v5i2.1952>
- Heriyanto. (2022). Comparison of Law in the System of Applying Legal Aid to the Poor in Indonesia (Before and After the Enacting of Legal Aid Law). *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(2), 140–148. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v9i2.3354>
- Huda, M., & Azzahro, M. Z. (2023). Peran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Agama Bantul. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 9(1), 1–15. <https://doi.org/10.58401/faqih.v9i1.870>
- Hutabarat, D. T. H., Salam, A., Zuwandana, A., Al Azmi, C., Wijaya, C. R., Darnita, Tania, I., Lubis, L. K. A., Sitorus, M. A. P., Adawiyah, R., & Sinaga, R. (2022). *Analysis of the Implementation of Law in Every Level of Society in Indonesia. Policy, Law, Notary and Regulatory Issues (Polri)*, 1(2), 9–14. <https://doi.org/10.55047/polri.v1i2.80>
- Imronah. (2008). *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*. Jurnal, 1(8), 65–85.
- Indiahono, D. (2017). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Kusumanegara, S. (2010). *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.

- Marlina, A., Rasna, R., Rahman, A., & Suci, P. (2024). Akses Keadilan Yang Tidak Sampai: Studi Kajian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 540. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8668>
- Meutia, I. F. (2017). *Analisis Kebijakan Publik*. In M. Nizar (Ed.), *Analisis Kebijakan Publik*. AURA (CV. Anugrah Utama Raharja).
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Murdiyana, M., & Mulyana, M. (2017). Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 10(1), 73–96. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.384>
- Nugroho, R. (2021). *Kebijakan Publik: Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Digital. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Nursapiah. (2020). *Penelitian Kualitatif* (H. Sazali (ed.); 1 ed.). Wal ashri Publishing.
- Purwanto, E. A. (2007). Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(3), 295–324.
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Solo: Unisri Press. https://sirisma.unisri.ac.id/berkas/41naskah-A5_Joko-Pramono_Implementasi-....pdf
- Pratama, G. N. (2016). Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia. *Veritas et Justitia*, 2(2), 424. <https://doi.org/10.25123/vej.2274>
- Rahmat, D. (2017). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan. *Jurnal Unifikasi*, 04(1). <https://doi.org/10.36841/fenomena.v2i1i.2911>
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1–12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Ripley, R. B., & Franklin, G. A. (1986). *Policy Implementation and Bureaucracy*. In *Public Administration Review*. Chicago-Illinois: the Dorsey Press
- Salim & Syahrums. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cipta Pustaka Media
- Siregar, N. (2022). Menentukan Model Implementasi Kebijakan Dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator

(PKA). *Jurnal Ilmu Sosial*, 1(7), 713–722.

Suyanto, B. (2001). Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 14(4), 25–42.
http://journal.unair.ac.id/filerPDF/_3_Bagong.pdf

Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Syahrudin. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Studi Kasus*. Bandung: Penerbit Nusa Media.

Thoha, M. (2008). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Vardiansyah, D. (2008). *Filsafat Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Indeks

Vermeesch, G. (2014). Access to justice: Legal aid to the poor at civil law courts in the eighteenth-century low countries. *Law and History Review*, 32(3), 683–714. <https://doi.org/10.1017/S0738248014000261>

Wahab, A. S. (2012). *Analisis Kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Winarno, B. (2023). *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Edisi Digital. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).

Yunus, N., & Djafaar, L. (2008). Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam Memberikan Layanan Hukum kepada Masyarakat di Kabupaten Gorontalo. *Mimbar Hukum*, 20(3), 547-558.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 067/DJA/SK.KU1/II/2024 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pos Bantuan Hukum Di Lingkungan Peradilan Agama

Sumber lain:

Archive.org

<https://archive.org/details/policyimplementa0000ripl/page/232/mode/1up>
(diakses pada Minggu, 22 September 2024).

Badan Peradilan Agama

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengumuman-elektronik/pengumuman-elektronik/petunjuk-teknis-pelaksanaan-anggaran-pos-bantuan-hukum-di-lingkungan-peradilan-agama-23-2> (diakses pada Kamis, 26 September 2024).

Fakultas Hukum Umsu

<https://fahum.umsu.ac.id/panitera-pengertian-jenis-dan-tugasnya-dalam-pengadilan/> (diakses pada Kamis, 26 September 2024)

Google Books

<https://books.google.co.id/books?id=p0wXBAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false> (diakses pada Minggu, 22 September 2024).

KBBI

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/> (diakses pada Minggu, 18 Agustus 2024)

Mahkamah Agung RI

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3363/bphn-ma-wacanakan-sinergitas-bantuan-hukum-untuk-masyarakat-miskin> (diakses pada Jum'at, 1 November 2024).

Pengadilan Agama Purwokerto

<https://pa-purwokerto.go.id/layanan-hukum/layanan-bantuan-hukum> (diakses pada Sabtu, 21 September 2024).

SIPP PA Purwokerto

https://sipp.pa-purwokerto.go.id/statistik_perkara (diakses pada Senin, 19 Agustus 2024)

Pengadilan Agama Palangkaraya

<https://pa-palangkaraya.go.id/tugas-dan-fungsi-bidang-kepaniteraan/> (diakses pada Kamis, 26 September 2024).